BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bantuan pinjaman pemilikan rumah pegawai oleh bidang keuangan PT. PLN diproses apabila syarat yang telah ditentukan sebelumnya telah dipenuhi oleh peserta yang bersangkutan.
2. Prosedur bantuan pinjaman kepemilikan rumah pegawai menggunakan alat dan bahan dan dilakukan menurut dasar hukum prosedur BPRP.
3. Bantuan pinjaman kepemilikan rumah di PT. PLN (PERSERO) UPD Bandung dalam pencairan tunjangan pemilikan rumah diperoleh dari bidang operasi dan pelayanan, bidang administrasi kepesertaan, bidang keuangan.
4. Dalam prosedur pencairan pinjaman kepemilikan rumah tidak dikeluarkan biaya karena alat atau bahan yang diperlukan sudah ada.

4.2 Saran

Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan diatas, penulis akan mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian tunjangan kesejahteraan bantuan pemilikan rumah pegawai di PT. PLN (PERSERO) UPD Bandung sebaiknya dilakukan secara merata terhadap pegawainya, bukan saja berdasarkan oleh golongan atau peringkat jabatan saja.
2. Sebaiknya Bantuan Pemilikan Rumah Pegawai tidak terjadi over leafe atau pemilikan rumah yang diberikan dua kali, terhadap pegawai yang sudah mendapatkannya.

Dengan demikian saran yang telah penulis buat, semoga dapat berguna dan bermanfaat bagi perusahaan untuk masa yang akan datang.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan urutan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan keputusan Gubernur No.1 Tahun 2002 tentang Mekanisme/penyusunan anggaran pembangunan Propinsi Jawa Barat, dalam pelaksanaannya pembuatan penyusunan anggaran APBD melibatkan unsur atau bagian terkait yang terdiri dari :
   a. Gubernur Propinsi Jawa Barat
   b. Unsur Bapeda (Badan Pengawas Daerah)
   c. Unsur Biro Keuangan
   d. Unsur Biro Pengendalian
   e. Tim Teknis Khusus
2. Berdasarkan keputusan Gubernur No.1 Tahun 2002 prosedur penyusunan anggaran pembangunan Propinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :
   a. Persiapan pelaksanaan
   b. Asistensi
   c. Penyerahan DIKDA dan DIPDA
3. Pelaksanaan penyusunan anggaran pembangunan harus didukung dengan fungsionalisasi dan profesionalisasi para pegawai dalam mengelola

anggaran tersebut, terutama dalam pencapaian mutu dan kualitas proyek pembangunan APBD. Dalam menyusun proyek APBD harus menyebar.

4. Dalam melaksanakan penyusunan anggaran pembangunan Propinsi Jawa Barat tidak selalu selamanya berjalan lancer, karena dalam suatu pelaksanaan juga terdapat hambatan-hambatan yang dapat mengganggu kelancaran penyusunan anggaran. Dalam menanggulangi hambatan-hambatan tersebut diperlukan usaha-usaha untuk mengatasinya yang diharapkan dapat menanggulangi hambatan-hambatan terhadap pelaksanaan penyusunan anggaran pembangunan Propinsi Jawa Barat agar berjalan dengan lancar, akurat, tepat waktu dan relevan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil kerja praktek selama 1 bulan, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat, antara lain :

1. Penulis menyarankan kepada pegawai Bagian Program Perekonomian untuk meningkatkan disiplin kerja.
2. Tetap menjaga hubungan kerjasama yang baik antar sesama pegawai.
3. Penyimpanan surat-surat atau dokumen-dokumen harus dipelihara dengan baik agar dapat mempermudah dalam penemuan kembali surat-surat atau dokumen-dokumen yang diperlukan.
4. Mesin-mesin kantor yang sudah tidak dapat dipakai lagi sebaiknya disimpan di gudang agar tidak memenuhi ruangan.